

## Meninjau Kembali Kebijakan Pengadaan Tanah: Menuju Kerangka Kerja yang Lebih Adil untuk Pengembangan Kepentingan Publik

Noor Rahmat

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia

E-mail : [rohmatnoor81@gmail.com](mailto:rohmatnoor81@gmail.com)

---

**Kata kunci:**

Adil;  
Kepentingan  
Pengadaan  
Peninjauan Ulang;

Kebijakan;  
Publik;  
Tanah;

**Abstrak**

Kebijakan pengadaan tanah merupakan aspek penting dalam pembangunan yang memengaruhi kepentingan publik secara langsung. Penelitian ini mengulas perlunya peninjauan ulang terhadap kebijakan pengadaan tanah guna menciptakan kerangka kerja yang lebih adil bagi pengembangan kepentingan publik. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk peninjauan ulang kebijakan pengadaan tanah dalam konteks pembangunan untuk memastikan keadilan dan kepentingan publik terpenuhi dengan baik. Manfaat penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas konflik dalam pengadaan tanah dan tantangan dalam mencapai keseimbangan antara kepentingan publik dan hak-hak individu. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kebijakan dan studi literatur. Hasil penelitian menyoroti tantangan dalam kebijakan pengadaan tanah dan memberikan wawasan tentang bagaimana kerangka kerja yang lebih adil dapat diterapkan dalam praktiknya. Dalam pembahasan, fokus diberikan pada implikasi kebijakan terhadap hak-hak pemilik tanah dan alternatif solusi untuk meningkatkan keadilan. Kesimpulan dan saran disajikan untuk mendorong implementasi kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan publik.

**Keywords:**

Fair; Land Acquisition; Policy; Public Interest; Review;

**Abstract**

Land acquisition policy is an important aspect of development that directly affects the public interest. This research reviews the need for a review of land acquisition policies to create a fairer framework for public interest development. The purpose of this study is to identify the need for a review of land acquisition policies in the context of development to ensure fairness and public interest are well met. This research benefits to provide a better understanding of the complexities of conflict in land acquisition and the challenges of achieving a balance between public interest and individual rights. The research methods used are policy analysis and literature study. The results highlight challenges in land acquisition policy and provide insight into how fairer frameworks can be applied in practice. In the discussion, focus was given to policy implications for landowner rights and alternative solutions to improve justice. Conclusions and suggestions are presented to encourage the implementation of policies that are fairer and in favor of the public interest.

---

\*Correspondence Author: Noor Rahmat  
Email: [rohmatnoor81@gmail.com](mailto:rohmatnoor81@gmail.com)



### PENDAHULUAN

Kebijakan pengadaan tanah merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk memperoleh hak atas tanah untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, proyek publik, atau pengembangan ekonomi (Kotalewala et al., 2020); (Sutedi, 2020). Dalam

konteks pembangunan, kebijakan ini memegang peranan penting karena tanah seringkali menjadi aset yang sangat berharga dan vital dalam pelaksanaan proyek-proyek besar (Mutiani et al., 2024) (Prasetya & Subekti, 2022).

Dalam proses pengadaan tanah, seringkali terjadi konflik antara kepentingan publik yang luas dan hak-hak individu yang terkena dampak. Misalnya, warga yang memiliki tanah mungkin harus dipindahkan atau kehilangan sumber mata pencaharian mereka akibat pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, atau proyek industri (Mogi, 2021). Konflik semacam ini menciptakan tantangan yang kompleks dalam upaya mencapai keseimbangan antara kepentingan publik dan hak-hak individu.

Peninjauan ulang kebijakan pengadaan tanah diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan berpihak kepada kepentingan publik secara keseluruhan (Cahyani & Rahman, 2021). Ini mencakup beberapa aspek penting:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas** yaitu proses pengadaan tanah harus transparan dan akuntabel, memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar dan memberikan akses yang adil terhadap informasi tentang keputusan yang diambil dan dampaknya.
2. **Kompensasi yang Adil** yang artinya para pemilik tanah yang terkena dampak harus menerima kompensasi yang adil dan memadai sesuai dengan nilai properti mereka dan kerugian yang mereka alami akibat pengadaan tanah.
3. **Perlindungan Hak Asasi Manusia** yaitu kebijakan pengadaan tanah harus melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak properti, hak atas mata pencaharian, dan hak atas rumah dan tempat tinggal yang layak.
4. **Partisipasi publik** harus dipromosikan dalam setiap tahap kebijakan pengadaan tanah, mulai dari perencanaan hingga implementasi, sehingga kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat dapat diperhitungkan secara memadai.
5. **Evaluasi dan Peninjauan Ulang** yaitu kebijakan pengadaan tanah harus secara teratur dievaluasi dan ditinjau ulang untuk memastikan bahwa tujuan keadilan dan kepentingan publik terpenuhi dengan baik.

Selain itu, penting juga untuk memperhitungkan perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kebijakan pengadaan tanah (Saka & Setiadi, 2022). Ini berarti mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang dari pengadaan tanah terhadap komunitas lokal, serta memastikan bahwa lingkungan alam juga dilindungi dan dipertahankan (Anggraini et al., 2022). Dengan melakukan peninjauan ulang kebijakan pengadaan tanah dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan proses pembangunan dapat menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Kebaruan dari penelitian ini mencoba untuk memahami dampak jangka panjang dari kebijakan pengadaan tanah terhadap komunitas lokal dan lingkungan alam. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dalam konteks penggunaan sumber daya tanah.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk peninjauan ulang kebijakan pengadaan tanah dalam konteks pembangunan untuk memastikan keadilan dan kepentingan publik terpenuhi dengan baik, menganalisis kompleksitas konflik antara kepentingan publik dan hak-hak individu yang terkena dampak dalam proses pengadaan tanah, mengevaluasi implementasi dan kepatuhan kebijakan pengadaan tanah terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, kompensasi yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan partisipasi publik, mengidentifikasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan jangka panjang dari kebijakan pengadaan tanah terhadap komunitas lokal dan lingkungan alam dan merumuskan rekomendasi

untuk perbaikan kebijakan pengadaan tanah agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Manfaat penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas konflik dalam pengadaan tanah dan tantangan dalam mencapai keseimbangan antara kepentingan publik dan hak-hak individu, memberikan panduan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengadaan tanah, memastikan bahwa pemilik tanah yang terkena dampak menerima kompensasi yang adil sesuai dengan nilai properti mereka dan kerugian yang mereka alami, mengamankan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak properti, hak atas mata pencaharian, dan hak atas tempat tinggal yang layak bagi individu yang terkena dampak dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kebijakan pengadaan tanah untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini, yaitu analisis kebijakan dan studi literatur, merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan publik serta isu-isu yang terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki berbagai peraturan, kebijakan, dan pendekatan yang telah diterapkan dalam konteks pengadaan tanah, serta menganalisis berbagai solusi yang mungkin untuk meningkatkan keadilan dalam kebijakan tersebut.

### **1. Analisis Kebijakan**

Analisis kebijakan melibatkan tinjauan terhadap berbagai peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang ada terkait dengan pengadaan tanah. Ini termasuk memeriksa dokumen-dokumen seperti undang-undang pertanahan, peraturan daerah, dan kebijakan pemerintah terkait pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan. Proses analisis kebijakan ini mencakup identifikasi tujuan, ruang lingkup, prosedur, dan ketentuan yang terdapat dalam kebijakan pengadaan tanah.

### **2. Studi Literatur Terkait**

Studi literatur merupakan langkah penting dalam memahami konteks, masalah, dan solusi yang terkait dengan kebijakan pengadaan tanah. Melalui studi literatur, peneliti dapat mengakses berbagai jurnal, artikel, buku, dan laporan penelitian yang membahas isu-isu terkait pengadaan tanah, seperti konflik kepentingan, kompensasi, partisipasi publik, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan mengeksplorasi literatur terkait, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang masalah yang dihadapi serta praktik terbaik dalam mengatasi tantangan tersebut.

### **3. Analisis Data dan Informasi**

Setelah mengumpulkan data dan informasi dari kedua sumber tersebut, langkah berikutnya adalah menganalisisnya secara sistematis. Ini melibatkan identifikasi pola, tren, dan temuan penting yang muncul dari analisis kebijakan dan studi literatur. Analisis ini dapat membantu mengungkap isu-isu kunci dalam kebijakan pengadaan tanah, mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik, serta mengevaluasi efektivitas berbagai pendekatan yang telah diterapkan dalam konteks pengadaan tanah.

### **4. Mengusulkan Solusi dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis, peneliti dapat mengusulkan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan keadilan dalam kebijakan pengadaan tanah. Ini bisa meliputi saran-saran untuk perbaikan kebijakan yang ada, rekomendasi untuk pendekatan baru atau inovatif, atau usulan

untuk langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Dengan menggabungkan analisis kebijakan dan studi literatur, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu yang terkait dengan pengadaan tanah dan mengidentifikasi jalur-jalur untuk meningkatkan keadilan dalam praktik pengadaan tanah untuk kepentingan publik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tantangan dalam Kebijakan Pengadaan Tanah**

Tantangan dalam kebijakan pengadaan tanah mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan infrastruktur dengan hak-hak individu, terutama pemilik tanah yang terkena dampak (Tetama et al., 2022). Berikut adalah penjelasan rinci untuk setiap tantangan yang dihadapi dalam kebijakan pengadaan tanah:

#### **1. Konflik Kepentingan antara Pengembangan Infrastruktur dan Hak-hak Individu:**

Konflik kepentingan antara pembangunan infrastruktur dan hak-hak individu sering terjadi karena pembangunan infrastruktur seringkali dianggap sebagai kebutuhan penting untuk kemajuan ekonomi dan sosial suatu wilayah. Pemerintah atau pengembang infrastruktur dapat melihat pembangunan tersebut sebagai solusi untuk meningkatkan aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun, pemilik tanah dan komunitas lokal yang terkena dampak mungkin mengalami kekhawatiran terhadap kehilangan tempat tinggal, lahan pertanian, atau mata pencaharian mereka. Konflik semacam ini seringkali melibatkan ketegangan antara kepentingan publik dalam pembangunan infrastruktur dan hak-hak individu terhadap properti dan keberlanjutan sosial ekonomi mereka (Utomo, 2020).

#### **2. Penilaian yang Tidak Adil dalam Penentuan Nilai Ganti Rugi:**

Penilaian nilai ganti rugi yang tidak adil sering menjadi masalah utama dalam kebijakan pengadaan tanah. Kurangnya transparansi dalam proses penilaian, ketidaksetaraan kekuasaan antara pemilik tanah dan pemerintah atau pengembang, serta kekurangan data yang akurat dapat menyebabkan penilaian yang tidak memadai. Pemilik tanah yang terkena dampak mungkin merasa bahwa nilai ganti rugi yang ditawarkan tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari properti mereka atau tidak memberikan kompensasi yang adil untuk kerugian yang mereka alami. Ketidakadilan dalam penilaian nilai ganti rugi dapat memicu ketidakpuasan, protes, dan konflik antara pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak.

#### **3. Perlindungan yang Kurang terhadap Masyarakat Adat dan Petani Kecil:**

Masyarakat adat dan petani kecil sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pengadaan tanah karena ketergantungan mereka pada tanah untuk mata pencaharian, tradisi, dan identitas budaya. Tantangan utama adalah perlindungan hak-hak mereka yang sering diabaikan dalam kebijakan pengadaan tanah. Kurangnya pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil, serta kurangnya akses mereka terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka, membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pengusiran tanpa kompensasi yang layak. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang serius bagi kelompok ini dan berpotensi menyebabkan ketegangan sosial dan konflik di tingkat lokal (Idawijayanti & Pramono, 2021).

## **Implikasi Kebijakan Terhadap Hak-hak Individu:**

### **1. Kebijakan yang Tidak Memadai dapat Mengancam Hak Milik dan Keberlanjutan Mata Pencaharian:**

Kebijakan pengadaan tanah yang tidak memadai seringkali mengancam hak milik dan keberlanjutan mata pencaharian individu yang terkena dampak. Ketika individu kehilangan hak atas tanah mereka karena proses pengadaan tanah yang tidak sesuai atau tanpa kompensasi yang memadai, mereka dapat mengalami ketidakpastian dan kerugian yang signifikan. Hak milik atas tanah adalah hak yang sangat penting bagi banyak individu, bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan keberlanjutan kehidupan mereka. Kehilangan tanah juga dapat mengakibatkan kehilangan akses terhadap sumber daya alam, seperti air dan tanah pertanian, yang dapat berdampak langsung pada keberlanjutan mata pencaharian dan kesejahteraan individu dan keluarga mereka (Susanti, 2020).

### **2. Ketidakpastian Hukum yang dapat Menyebabkan Ketidakadilan Bagi Individu:**

Ketidakpastian hukum yang sering terjadi dalam konteks kebijakan pengadaan tanah dapat menyebabkan ketidakadilan bagi individu yang terkena dampak. Ketidakpastian hukum terkait dengan proses pengadaan tanah, penilaian ganti rugi, atau prosedur hukum lainnya dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan tidak jelas bagi individu yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian tentang hak-hak mereka, keberlanjutan mata pencaharian, dan keamanan properti mereka (Abu, 2020). Ketidakpastian hukum juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang lebih kuat, seperti pemerintah atau pengembang, untuk memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum dan menguntungkan diri mereka sendiri, sementara individu yang lebih lemah terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum perlu diatasi melalui penyediaan kerangka hukum yang jelas, transparan, dan adil yang melindungi hak-hak individu yang terkena dampak pengadaan tanah.

## **Alternatif Solusi dan Perbaikan Kebijakan:**

### **1. Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan:**

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kebijakan pengadaan tanah adalah dengan meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi memastikan bahwa informasi yang relevan tentang proses pengadaan tanah, termasuk tujuan, prosedur, dan dampaknya, tersedia untuk masyarakat umum. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memahami secara lebih baik mengenai kebijakan yang sedang dilakukan dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Selain itu, partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kepentingan mereka dapat diakomodasi secara lebih baik. Melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pengadaan tanah dapat membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi dan menemukan solusi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan (Erdiana et al., 2021).

### **2. Memperkuat Mekanisme Evaluasi dan Peninjauan Ulang Kebijakan Secara Berkala:**

Mekanisme evaluasi dan peninjauan ulang kebijakan yang kuat dan terjadwal secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengadaan tanah dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan. Evaluasi yang berkala dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan yang ada, mengevaluasi dampak kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta menilai efektivitas dari berbagai strategi yang telah diterapkan. Dengan melakukan peninjauan ulang secara teratur, pemerintah dan

lembaga terkait dapat memperbaiki kebijakan yang ada, mengidentifikasi tren atau perubahan yang perlu diakomodasi, dan meningkatkan responsibilitas terhadap masyarakat.

### **3. Mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Keadilan Sosial dan Ekonomi dalam Kebijakan Pengadaan Tanah:**

Penting bagi kebijakan pengadaan tanah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi sebagai bagian integral dari perumusan dan implementasi kebijakan. Prinsip-prinsip ini mencakup perlindungan hak-hak individu, distribusi yang adil dari manfaat dan beban, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling rentan. Dengan memperhatikan keadilan sosial dan ekonomi, kebijakan pengadaan tanah dapat dirancang untuk mengurangi disparitas sosial, meningkatkan akses terhadap sumber daya, dan memperkuat kedudukan masyarakat yang terpinggirkan. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan mekanisme kompensasi yang adil, pemberdayaan masyarakat lokal, dan integrasi kebijakan pengadaan tanah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih luas (Hutabalian, 2022). Dengan demikian, kebijakan pengadaan tanah dapat menjadi instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar dalam masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan urgensi peninjauan ulang kebijakan pengadaan tanah sebagai langkah krusial untuk meningkatkan keadilan dan keberlanjutan pembangunan. Dari analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa kebijakan pengadaan tanah seringkali menghadapi tantangan yang signifikan dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan infrastruktur dengan hak-hak individu yang terkena dampak. Ketidakseimbangan ini sering kali menghasilkan ketidakadilan dan konflik sosial yang merugikan bagi masyarakat yang terkena dampak.

Saran yang diajukan berdasarkan temuan penelitian ini mencakup beberapa aspek yang penting. Pertama, perlu adanya penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih jelas dan tegas dalam konteks pengadaan tanah. Regulasi yang kuat dan tegas dapat membentuk landasan hukum yang kokoh untuk melindungi hak-hak individu dan mengatur proses pengadaan tanah secara transparan dan adil. Kedua, perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak individu yang terkena dampak pengadaan tanah harus menjadi fokus utama dalam perbaikan kebijakan. Hal ini meliputi penilaian yang adil dan transparan terhadap nilai ganti rugi, serta perlindungan yang lebih baik terhadap hak milik dan keberlanjutan mata pencaharian individu yang terkena dampak. Ketiga, partisipasi publik perlu ditingkatkan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pengadaan tanah. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap kebijakan dapat meningkatkan legitimasi kebijakan, mengurangi potensi konflik, dan memastikan bahwa kepentingan publik terwakili dengan baik dalam proses kebijakan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan bahwa kebijakan pengadaan tanah dapat menjadi lebih adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan publik. Dengan demikian, upaya pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara lebih berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## BIBLIOGRAPHY

- Abu, R. (2020). Strategi Institusional Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Amanna Gappa*, 12–20.
- Angraini, H., Ghozali, Z., & Sutandi, S. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim Di Kementrian PUPR. *JURNAL EKOBIS Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 31–48.
- Cahyani, C. M., & Rahman, A. (2021). Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Private Law*, 1(2), 242–250.
- Erdiana, N., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Eksistensi Bank Tanah Terkait Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, 14(2), 930–942.
- Hutabalian, M. (2022). Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Kebijakan Konsinyasi Berdasarkan Undang-Undang Ri Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kewenangan Negara Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 8(2), 548–558.
- Idawijayanti, T., & Pramono, R. W. D. (2021). Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Adi Soemarmo-Solo Balapan: Kebijakan Konservasi Vs Pembangunan Infrastruktur. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(2), 163–180.
- Kotalawala, F., Laturette, A. I., & Uktolseja, N. (2020). Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum. *Sasi*, 26(3), 415–433.
- Mogi, E. G. (2021). Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Lex Administratum*, 9(8).
- Mutiani, M., Pramudito, S., Marlina, E., Muchlashin, A., & Ruslan, H. (2024). Strategi Pemanfaatan Bantaran Sungai untuk Pengembangan Masyarakat Berkelanjutan: Sebuah Analisis Sistematis. *Nusantara Community Empowerment Review*, 2(1), 1–8.
- Prasetya, A. B., & Subekti, R. (2022). Aspek Hukum Pembayaran Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 250–264.
- Saka, P. A., & Setiadi, S. (2022). Konsepsi Keruangan Multipihak dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Kota di Lhokseumawe. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 8(2), 203–218.
- Susanti, L. E. (2020). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Kebijakan Struktural, Manuver Ekonomi Politik, Terkait Eksistensi Pemburu Rente. *Transparansi Hukum*, 3(2).
- Sutedi, A. (2020). *Implementasi prinsip kepentingan umum di dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Tetama, A. R., Suharno, S., & Tyola, Y. N. (2022). Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Memaknai Konsultasi Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah. *Widya Bhumi*, 2(2), 136–151.
- Utomo, S. (2020). Problematika Proses Pengadaan Tanah. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 20–36.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).